



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
10. Direktur Jenderal Imigrasi;
11. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
13. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2019

TANGGAL: 22 Januari 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	drh. CHAIRANI IDHA KOESMAYAWATI, S.H., M.H. NIP. 196110081986112001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
2.	HANTOR SITUMORANG, S.Pd., M.Si. NIP. 196703171992031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
3.	R. NATANEGARA KARTIKA PURNAMA, S.E., M.Si. NIP. 197309081999031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
4.	DJOKO PUDJIRAHARDJO, S.H., M.Hum. NIP. 196209261989031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	sda.
5.	MOHAMAD YUNUS AFFAN, S.H., M.H. NIP. 196204131982031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	sda.
6.	Dr. MOLAN TARIGAN, S.H., M.H. NIP. 195912121984031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	sda.
7.	Dra. ERNI WIDHYASTARI, Apt, M.Si NIP. 196003181991032001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	sda.

1	2	3	4	5	6
8.	ROCHADI IMAN SANTOSO, S.H., M.H. NIP. 196011071985031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	Direktur Kerja Sama Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
9.	MUHAMMAD YANIS, S.H., M.Hum. NIP. 195908251983031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Intelijen Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	sda.
10.	FERY MONANG SIHITE, S.H., M.H. NIP. 196205131987031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	Direktur Intelijen Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
11.	ZAEROJI, S.Sos., M.H. NIP. 196211011985031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	sda.
12.	Drs. BAMBANG WIDODO, M.M. NIP. 196007141984031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
13.	HUSNI THAMRIN, S.H., M.Hum. NIP. 196109011985031019	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
14.	TEODORUS SIMARMATA, S.H., M.Hum. NIP. 196606291991031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	sda.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY